



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jalan Parangtritis KM 5,5 Sewon Yogyakarta 55187
Telepon: (0274) 385323, 445271 – Faksimile: (0274) 415984 E-mail:
yogya@bpkp.go.id

SIARAN PERS

**BPKP DIY Selenggarakan Workshop Desa se-Kabupaten Bantul
*Dana Desa Akuntabel, Desa Maju Mandiri***

Yogyakarta (13/10). Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) D.I. Yogyakarta mengundang Camat dan Lurah se-Kabupaten Bantul dalam *workshop* evaluasi pengelolaan Dana Desa dan pemanfaatan hasil pembangunan desa. Kegiatan ini perlu dilakukan mengingat dari tahun ke tahun alokasi Dana Desa dalam APBN terus meningkat sehingga pengelolaannya harus didorong untuk semakin transparan, akuntabel, dan menghasilkan manfaat nyata bagi desa. Hal tersebut sejalan dengan arahan Presiden bahwa penyaluran Dana Desa harus benar-benar efektif dan berdampak signifikan terutama dalam percepatan ekonomi produktif, menggerakkan industri, mengurangi angka kemiskinan, dan mengatasi dampak wabah Covid-19.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Helmi Jamharis dalam sambutannya menyatakan bahwa masyarakat menaruh harapan tinggi agar kalurahan dapat melakukan kinerja yang lebih baik. Terlebih lagi, kalurahan merupakan garda terdepan dalam pelaksanaan pelayanan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk itu, kalurahan harus dapat membuktikan harapan masyarakat tersebut dengan mewujudkan pemerintahan kalurahan yang bersih, kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Salah satunya, melalui pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, guna melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang bermarwah, adil, maju dan sejahtera.

“Mengingat pentingnya pengelolaan keuangan kalurahan, maka lurah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan, harus bisa melakukan pengelolaan keuangan berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, dan dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, serta dapat menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun anggaran yang berkualitas sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditetapkan dalam standar akuntansi keuangan desa,” imbuhnya sebelum membuka secara resmi Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa pada Kabupaten Bantul.

Acara yang digelar di Ballroom Borobudur Hotel Grand Inna Malioboro tersebut menghadirkan narasumber Anggota Komite IV DPD RI Muhammad Afnan Hadikusumo, Inspektur III Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Elfin Elyas, Kepala Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Adi Gemawan, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan D.I. Yogyakarta Arvi Risnawati, serta dihadiri oleh 7 Kepala Perangkat Daerah, 17 Panewu, dan 75 Lurah.

Afnan Hadikusumo dalam paparannya menegaskan bahwa pada tahun 2022 pemerintah mengalokasikan Dana Desa sebesar Rp 439,27 milyar yang diperuntukkan 438 kalurahan pada 5 kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut data dari DjPb, penyerapan terbesar Dana Desa di Kabupaten Bantul yaitu sebesar 50,52% digunakan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak. Menurut Arvi Risnawati, hal tersebut sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan bencana alam, mitigasi dan penanganan bencana non-alam, dan mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa.

Sementara itu Elfin Elyas menyampaikan beberapa kelemahan yang ditemukan dalam pengelolaan keuangan desa antara lain belum diterapkannya audit berbasis risiko pada desa, belum adanya mekanisme penanganan pengaduan masyarakat, dan belum transparannya APBDes dan pertanggungjawabannya. Menyambung hal tersebut, Adi Gemawan menjelaskan bahwa BPKP telah membangun aplikasi Siskeudes dan Siswaskeudes untuk membantu kalurahan menyajikan informasi keuangan mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan, sehingga mempermudah penyusunan laporan keuangan, membantu pengendalian keuangan, dan mempermudah penatausahaan keuangan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas akuntabilitas laporan keuangan.

Dalam acara *workshop*, diserahkan penghargaan untuk kalurahan berprestasi dengan empat kategori yaitu kalurahan dengan realisasi anggaran belanja tertinggi yaitu Pleret, Srihardono, dan Mangunan, kalurahan dengan realisasi anggaran pendapatan tertinggi yaitu Banguntapan, Sitimulyo, dan Panggunharjo, kalurahan dengan pengelolaan asset paling tertib yaitu Sumberagung, Selopamioro, dan Pendowoharjo, serta kalurahan dengan laporan terbaik dan terlengkap yaitu Mulyodadi, Guwosari, dan Panjangrejo.
